

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Latar Belakang Berdirinya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara

Fraksi adalah sebuah perantara antara partai politik dan DPRD. Selain itu fraksi merupakan bagian dari DPRD yang memiliki beberapa tugas yaitu pertama, mengatur semua persoalan yang berhubungan dengan fraksi masing-masing. Kedua, meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan kinerja sebagai wakil masyarakat pada setiap kegiatan. Ketiga, memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta menyalurkan aspirasi tersebut. Pembentukan fraksi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sebuah partai politik yang terdiri dari beberapa anggota yang terstruktur yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Dari beberapa kelompok tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan maupun kewenangnya. Hal ini sepadan dengan apa yang telah dikatakan oleh Miriam Budiarjo dan Sigit Pamungkas yang mengatakan bahwa didalam partai politik terdapat sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan yang diperoleh ketika pelaksanaan pemilihan umum.<sup>1</sup>

Menurut ketua fraksi PKB yaitu Bapak Kholis Fu'ad, S.HI fraksi PKB merupakan fraksi yang kepanjangan dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa yang notabennya sebagai alat politik Nahdlatul Ulama, jadi kiprah seluruh anggota dewan di fraksi PKB yaitu melaksanakan amanah dari Nahdlatul Ulama yang didalamnya terdapat warga NU yang terbagi dalam beberapa komunitas, misalnya petani, pendidik, pondok pesantren dll<sup>2</sup> Sedangkan menurut Bapak Miftahurroqib

---

<sup>1</sup> Sigit Pamungkas, "Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia", (Yogyakarta: Institute Democracy And Welfarisme, 2011),5.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kholis Fu'ad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari, 2022.

mengatakan bahwa<sup>3</sup> : “ fraksi PKB ini adalah fraksi yang visinya bersinergi dengan Nahdlatul Ulama, jadi dapat dikatakan bahwa PKB itu memperjuangkan visi NU, ini merupakan keistimewaan dari fraksi PKB dibandingkan dengan fraksi lain. Kalau misalnya partai yang religius misalnya PPP itu kan visinya masih umum. Kalau PKB itu kan alat politik NU atau dilahirkan dari NU sehingga visinya itu mengawal program-program dan mengawal kebijakan NU, yang istimewa disitu. Secara kepentingan itu arahnya kesana namun dalam masyarakat kita tetap mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat”. Lain halnya dengan Bapak Nur Hamid yang mengatakan bahwa<sup>4</sup> : “ fraksi PKB ini adalah fraksi yang baik, mengayomi masyarakat dalam artian pembuatan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat”. Sedangkan menurut tenaga ahli fraksi PKB yaitu Bapak Mulyadi menganggap bahwa fraksi PKB adalah fraksi yang kental dengan nuansa pesantren, kental dengan suasana isu-isu kemasyarakatan, dan rata-rata DPRnya itu berasal dari tokoh masyarakat, tidak asal-asalan nyalon namun memang dilatarbelakangi entah itu dari tokoh masyarakat, ketua organisasi NU atau kyai, dari anshor, dari ma’arif dan organisasi NU lainnya. Itu adalah ciri khas dari fraksi PKB dibandingkan dengan fraksi-fraksi yang lain.<sup>5</sup>

Berdirinya fraksi PKB dilatar belakang oleh adanya keinginan umat muslim NU untuk membuat sebuah partai dan dijadikan sebagai tempat atau wadah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Ternyata hal ini menjadi salah satu latar belakang berdirinya sebuah partai politik Islam. Selain itu berdirinya sebuah partai politik Islam disebabkan oleh beberapa hal lain diantara, munculnya kesadaran umat muslim untuk berdakwah melalui media politik, namun disisi lain tidak mengesampingkan jalur kultural. Apabila umat muslim memegang kekuasaan maka proses dakwah amar ma’ruf nahi munkar melalui undang-undang negara akan dipermudah.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Miftahurroqib, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari, 2022.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Nur Hamid, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari, 2022.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mulyadi, Tenaga Ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Januari, 2022.

Tingkat kesadaran dalam berdakwah umat muslim NU dalam fraksi PKB tentunya meningkat, karena melihat kondisi lingkungan masyarakat saat ini yang tidak baik-baik. Melalui proses dakwah tersebut maka sedikit demi sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat terikait dengan politik, yang awal mulanya menganggap politik sebagai permasalahan duniawi menjadi ukhrawi.<sup>6</sup>

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang tergolong sebagai partai politik Islam dan biasa disingkat dengan PKB. PKB didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah/ 23 Juli 1998. Pengurus partai ditingkat pusat berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai PKB berasaskan pada pancasila. Sedangkan prinsip perjuangan partai adalah sebagai pengabdian kepada Allah SWT dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan dan kesatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Wal'jamaah. Jati diri yang ada pada partai PKB adalah nasionalis, agamis dan humanis. Sedangkan wataknya yaitu moderat, toleransi dan adil.<sup>7</sup> Dalam proses mengayomi dan mensejahterakan masyarakat tentunya tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Namun dalam proses pelaksanaannya fraksi PKB tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu fraksi PKB berupaya untuk meningkatkan prinsip ajaran Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai partai politik Islam. Dari adanya statemen tersebut maka fraksi PKB ini dinyatakan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada dalam mendirikan partai Politik Islam.

Partai politik Islam fraksi PKB ini dijadikan umat muslim sebagai sarana atau media komunikai politik antara pemerintah dengan masyarakat selain itu dengan adanya fraksi PKB dapat mempermudah umat muslim khususnya NU untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui jaringan aspirasi masyarakat untuk bertemu secara langsung dengan anggota

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022

<sup>7</sup> Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Sekretariat Jendral DPP PKB, Jakarta 2019. 16.

DPRD fraksi PKB. Hal ini sepadan dengan teori partai politik yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich yaitu partai politik sebagai sekelompok manusia yang terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partai, Selain itu memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang sifatnya idiil dan materiil.<sup>8</sup> Untuk mempertahankan kewenangan tersebut perlu adanya komunikasi politik dengan masyarakat melalui media penyesuaian kondisi lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi anggota DPRD fraksi PKB untuk tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat sesuai dengan dapil masing-masing.

## 2. Struktur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jepara Periode 2019-2024<sup>9</sup>

- Ketua : Kholis Fu'ad, S.HI.  
 Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Solikhin, M.Si.  
 Sekretaris : Miftahurroqib, S.Ag.,M.SI.  
 Anggota : 1. KH. Nuruddin amin, S.Ag.  
                   2. H. Nur Hamid, S.Ag.  
                   3. Moh Siroj, BA.  
 Tenaga Ahli : 1. Mulyadi  
                   2. Heri

Periode 2019-2024 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara diketuai oleh Bapak Kholis Fu'ad, S.HI., selain menjadi ketua fraksi, beliau juga tergabung sebagai anggota Komisi D dan Badan Anggaran. Sedangkan wakil ketua diduduki oleh Bapak Drs. H. Ahmad Solikhin, M.Si, selain menjadi wakil ketua beliau juga tergabung sebagai anggota Komisi C dan wakil ketua pada Badan Kehormatan. Selain ketua dan wakil ketua struktur fraksi PKB juga terdapat sekretaris yang diduduki oleh Miftahurroqib, S.Ag.,M.SI., beliau juga tergabung sebagai anggota Komisi A dan Bapemperda. Lain halnya dengan anggota yang diduduki oleh pertama, KH. Nuruddin amin, S.Ag., selain menjadi anggot

---

<sup>8</sup> Sigit Pamungkas, “ Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia”, (Yogyakarta: Institute Democracy And Welfarisme, 2011),5.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

fraksi PKB posisi beliau adalah sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Jepara dan Badan Anggaran. Kedua, H. Nur Hamid, S.Ag., selain menjadi anggota fraksi PKB beliau juga tergabung sebagai ketua Komisi B dan anggota Badan Anggaran. Ketiga, Moh Siroj, BA., selain menjadi anggota fraksi PKB beliau juga tergabung sebagai sekretaris Komisi A dan anggota pada Badan Musyawarah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seluruh anggota DPRD fraksi PKB dibantu oleh Tenaga Ahli yaitu Bapak Mulyadi dan Bapak Heri.

### 3. Daerah Pilihan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara

Periode 2019-2024 Fraksi PKB ini mendapatkan 6 kursi yang terdiri dari 5 dapil. Dapil I diwakili oleh Bapak Drs.H. Ahamad Solikhin, M.Si. Kedudukan beliau sebagai Wakil Ketua fraksi PKB. Selain itu juga beliau tergabung dalam Alat Kelengkapan Dewan yaitu sebagai anggota Komisi C dan sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan. Dapil I ini terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Jepara, kecamatan Tahunan, Kecamatan kedung dan Kecamatan Karimunjawa.<sup>10</sup>

Dapil II ini diduduki oleh 2 wakil rakyat, *pertama*, Bapak KH. Nuruddin Amin, S.Ag., beliau berkedudukan sebagai anggota, selain itu beliau juga tergabung dalam Alat Kelengkapan Dewan yaitu sebagai Wakil Ketua DPRD kabupaten jepara dan tergabung dalam Badan Anggaran. *Kedua*, Bapak H. Nur Hamid, S.Ag., beliau berkedudukan sebagai anggota, selain itu beliau juga tergabung dalam Alat Kelengkapan Dewan yaitu sebagai Ketua Komisi B dan sebagai anggota Badan Anggaran. Dapil II ini meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bangsri, Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Pakis Aji.<sup>11</sup>

Dapil III diwakili oleh Bapak Kholis Fu'ad, S.HI., beliau merupakan sebagai Ketua Fraksi PKB Kabupaten Jepara. Selain itu beliau juga tergabung pada Alat Kelengkapan Dewan yaitu Sebagai anggota Komisi D dan Badan Anggaran.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Nur Hamid, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari 2022.

Dapil III ini terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Donorojo, Kecamatan Kembang dan Kecamatan Keling.

Dapil IV diwakili oleh Bapak Miftahurroqib, S.Ag.,M.Si. Kedudukan beliau sebagai sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara. Selain itu juga beliau tergabung dalam Alat Kelengkapan Dewan yaitu sebagai anggota di Komisi A dan Bapemperda. Dapil IV ini terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Welahan.<sup>12</sup>

Dapil V diwakili oleh Bapak H. Moh. Siroj, BA. Kedudukan beliau adalah sebagai anggota di Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara. Selain itu beliau juga tergabung dalam Alat Kelengkapan Dewan yaitu sebagai Sekretaris Komisi A dan sebagai anggota Badan Musyawarah. Dapil V ini terdiri dari 3 kecamatan yaitu, kecamatan Pecangaan, kecamatan Batealit dan Kecamatan Kalinyamatan. Selain itu fraksi PKB juga didampingi oleh 2 tenaga ahli yaitu Bapak Mulyadi dan Bapak Heri. Tenaga ahli ini berperan untuk mendampingi dewan dalam setiap kegiatan.<sup>13</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Kabupaten Jepara**

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai yang memiliki ciri khas khusus dibandingkan dengan partai lain. Dibuktikan bahwa partai PKB merupakan partai yang memperjuangkan visi NU. Meskipun secara kelembagaan partai ini secara jelas mencamtumkan pancasila sebagai asas partai, namun tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya PKB dilatarbelakangi oleh organisasi keagamaan terbesar diindonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sebuah partai politik yang terdiri dari beberapa anggota yang terstruktur yaitu ketua, sekretaris dan anggota. Dari beberapa kelompok tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan maupun kewenanganya. Hal ini

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Miftahurroqib, sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari 2022.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

sepadan dengan apa yang telah dikatakan oleh Miriam Budiarmo dan Sigit Pamungkas yang mengatakan bahwa didalam partai politik terdapat sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan yang diperoleh ketika pelaksanaan pemilihan umum.<sup>14</sup>

PKB merupakan partai politik yang bersaskan pada pancasila sedangkan watak dari partai PKB adalah moderat, toleransi dan adil. Partai ini memiliki beberpa tujuan diantaranya adalah sebagai tempat untuk menghimpun masyarakat, sebagai alat perjuangan, sebagai penyaluran aspirasi dan dijadikan sebagai sarana artikulasi dan agresi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga, selain itu PKB dijdikan sebagai saran untuk melahirkan kader dan pimpinan politik bangsa dan Negara.

## **2. Visi dan Misi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara**

Berikut ini adalah visi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):

- 1). Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang pada UUD 1945.
- 2). Mewujudkan masyarakat yang adil makmur, baik secara lahir batin maupun secara material dan spiritual.
- 3). Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Berikut ini misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):

- 1). Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang adil dan demokratis.
- 2). Bidang Hukum: berupaya mengembangkan Negara yang beradab, serta mengayomi masyarakat dan menjunjung HAM.
- 3). Bidang Sosial Budaya: membahngun budaya yang maju dan modern namun tetpa memelihara jatidiri bangsa.
- 4). Bidang Pendidikan: meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia dan peduli dengan lingkungan sosial.
- 5). Bidang Pertahanan: meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk mempertahankan Negara, mewujudkan swabela terhadap perlakuan yang menimbulkan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

rasa tidak aman, baik dalam institusi maupun dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dari beberapa visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa fraksi PKB merupakan fraksi yang kental dengan isu-isu kemasyarakatan, kental dengan nuansa pesantren, dari beberapa anggota DPRD fraksi PKB Kabupaten Jepara dilatarbelakangi dari tokoh masyarakat maupun dari organisasi NU. Selain itu dalam proses mengayomi masyarakat tentunya PKB menyesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat dengan berlandaskan pada UUD 1945 namun tidak mengesampingkan al-Qur'an dan Hadist.

### **3. Strategi Komunikasi Politik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara**

Fraksi PKB dalam mengayomi masyarakat tentunya memiliki beberapa strategi yang diterapkan, yaitu melalui komunikasi politik. Komunikasi politik akan terjadi dengan baik apabila memenuhi beberapa unsur yaitu meliputi komunikator, komunikan, pesan yang disampaikan dan media penyampaian pesan.<sup>16</sup> Komunikasi politik yang telah dilaksanakan oleh fraksi PKB Kabupaten Jepara melalui 2 metode yaitu melalui kegiatan reses dan Organisasi Garda Bangsa. Berikut ini adalah penjejelasan komunikapolitik melalui reses dan organisasi Garda Bangsa:

#### **1) Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Kabupaten Jepara**

Reses merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya rutin dan menjadi tanggung jawab oleh setiap masing-masing anggota DPRD. Selain itu reses juga dapat dikatakan sebagai masa istirahat, dengan mengunjungi daerah pilihan masing-masing pada kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu setiap periode selama 5 tahun dilaksanakan reses sebanyak 14 kali, dalam satu tahun dilakukan reses sebanyak 3 kali. Dalam satu kali reses dilaksanakan selama 3 hari, setiap harinya dibatasi dengan 80 peserta reses. Kegiatan reses ini dilakukan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>16</sup> Kamaruddin, "Modul Komunikasi Politik.", *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No 9 (2015): 6.

dengan tujuan untuk menjalin komunikasi politik dalam bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Diakhir kegiatan reses tentunya dibentuk sebuah pelaporan yang dibuat oleh setiap anggota DPRD dan direkapitulasi oleh Tenaga Ahli fraksi PKB, setelah itu laporan tersebut disampaikan oleh ketua fraksi kepada pimpinan DPRD pada sidang paripurna.<sup>17</sup>

Kegiatan reses dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jepara sebanyak 50 orang. Dalam proses pelaksanaan kegiatan reses tentunya harus melalui beberapa tahap yaitu sosialisasi reses, pengambilan dokumen reses, penandatanganan pakta integritas, pelaksanaan reses dan SPJ final serta penyerahan laporan kepada sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. Untuk persiapan internal dari fraksi hampir tidak ada persiapan, walaupun ada itu hanya lewat grup whatshap. Hal ini kemungkinan akan terjadi beberapa permasalahan atau hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan reses, karena berdiskusi lewat grup whatshap dinilai kurang efektif.<sup>18</sup>

Reses fraksi PKB dilaksanakan oleh 6 anggota, sedangkan peserta reses berasal dari seluruh lapisan masyarakat diantaranya dari pemerintahan yaitu camat, TNI/Polri/PNS, lurah/kades/Perangkat Desa, ketua RW/RT. Dari kelompok masyarakat yaitu organisasi politik, tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Majelis Ta'lim, masyarakat umum. Jumlah keseluruhan peserta reses sebanyak 80 orang per hari dan dibagi menjadi 3 shift selama tiga hari. Karena masih dalam kondisi pandemi, selain itu peserta reses dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Laporan Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara Tahun 2021

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>19</sup> Laporan Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara Tahun 2021

Dari keenam anggota DPRD Fraksi PKB kabupaten Jepara, peneliti mengambil 3 anggota DPRD untuk dijadikan sebagai narasumber yaitu Bapak Kholis Fu'ad ( ketua fraksi PKB), Bapak Miftahurroqib ( sekretaris fraksi PKB) dan Bapak Nur Hamid (anggota fraksi PKB), 1 Tenaga Ahli yaitu Bapak Mulyadi dan 3 peserta reses dari 3 daerah pilihan, yaitu dapil 2, 3 dan 4. Ketiga anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses tersebut tentunya memiliki perbedaan, seperti waktu dan tempat pelaksanaan reses. Terkait dengan waktu dari ketiga anggota DPRD tersebut reses dilaksanakan pada tanggal 17,18 dan 19 Januari 2021. Namun sift dilakukan pada jam yang berbeda. Bapak Kholis Fu'ad melaksanakan reses pada pukul 12.00 WIB-21.00 WIB. Sedangkan Bapak Nur Hamid melaksanakan reses pada pukul 08.00 WIB-22.00 WIB, sama halnya yang dilaksanakan oleh Bapak Miftahurroqib. Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan reses ini dilaksanakan sesuai dengan daerah pilihannya yaitu Bapak Nur Hamid di dapil 2, Bapak kholis di dapil 3, dan Bapak Miftahurroqib di dapil 4.

Ketika pelaksanaan kegiatan reses tentunya difasilitasi oleh DPRD, yaitu berupa uang melalui transfer bank yang diberikan kepada anggota DPRD dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak Rp 20.846.000. Dana tersebut dianggarkan untuk ATK, snack, sewa gedung, sewa tenda dll. Namun lain halnya dengan uang transport yang diberikan oleh anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses, uang transport tersebut bukan berasal dari anggaran yang diberikan oleh DPRD, melainkan dari anggota DPRD itu sendiri.<sup>20</sup> Pemberian uang transport ini dijadikan sebagai salatu strategi untuk menarik simpati umat muslim untuk mengikuti kegiatan reses. Strategi yang digunakan tentunya berbeda antara anggota DPRD satu dengan yang lainnya. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menarik simpati peserta reses khususnya umat muslim untuk mengikuti kegiatan reses, diantaranya melakukan

---

<sup>20</sup> Dokumen Anggaran dan Sosialisasi Reses DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2021

pendekatan kepada organisasi NU selain itu memberikan snack, makan siang, kalender dan uang transport sebanyak Rp 50.000,00.

Hasil dari pelaksanaan reses yang telah dilakukan oleh ketiga anggota DPRD Kabupaten Jepara, masyarakat lebih banyak menyampaikan aspirasi terkait dengan infrastruktur pembangunan jalan, sekolah. Ketika proses penyampaian aspirasi tersebut muncul beberapa hambatan, diantaranya adalah karena keterbatasan waktu pelaksanaan reses, keterbatasan dana yang menyebabkan tingkat partisipasi peserta reses (umat muslim) menurun, tidak tepat waktu, tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan reses belum maksimal, jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan jumlah undangan, selain itu peserta yang datang belum tentu dapat menganalisa masalah dilingkungan dengan waktu yang cukup singkat. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan karena kurangnya persiapan secara matang oleh anggota DPRD dan masyarakat untuk menghadapi pelaksanaan kegiatan reses. Hambatan-hambatan yang muncul tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan komunikasi politik antara anggota DPRD bersama dengan masyarakat dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan reses akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan bersama.<sup>21</sup>

Selain kegiatan reses untuk menjalin komunikasi politik yang maksimal fraksi PKB Kabupaten Jepara juga melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui Organisasi Garda Bangsa Kabupaten Jepara. Organisasi Garda Bangsa merupakan sayap bagi berdirinya PKB. Berikut ini penjelasan terkait dengan Organisasi Garda Bangsa Kabupaten Jepara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

## 2) Organisasi Garda Bangsa Kabupaten Jepara

Selain adanya kegiatan reses, strategi komunikasi yang dilakukan oleh fraksi PKB tidak lain adalah melalui kegiatan Organisasi Garda Bangsa. Garda bangsa merupakan suatu organisasi yang menjadi sayap bagi PKB. Garda Bangsa dijadikan sebagai supporting sistem bagi PKB. Anggota dari organisasi Garda Bangsa adalah dikhususka kepada para pemuda jepara salah satunya adalah mahasiswa. Mengingat bahwa pemilihan ditahun selanjutnya sasarannya adalah pemilih pemula. PKB memanfaatkan organisasi Garda Bangsa sebagai penambah pendukung dalam pemilihan umum dan sebagai jembatan warga nadliyin untuk terjun didunia politik serta melanjutkan regenerasi yang ada pada partai. Selain itu anggota Garda Bangsa Kabupaten Jepara berasal dari organisasi-organisasi Nahdlatul Ulama dengan alasan bahwa PKB ini merupakan partai yang notabnya berasal dari Badan otonom NU. Anggota Organisasi Garda Bangsa diantaranya adalah Gerakan pemuda Anshor, IPNU dan IPPNU, Muslimat, Fatayat dll. PKB melakukan pertemuan setiap satu bulan sekali bersama dengan organisasi Garda Bangsa dengan tujuan untuk mendengarkan aspirasi mereka dan membahas isu-isu yang sedang terjadi dilingkungan masyarakat.

Namun dalam proses pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dibuktikan oleh peneliti ketika melakukan wawancara kepada peserta reses yang notabennya sebagai anggota fatayat, ternyata beliau belum mengenal Organisasi Garda Bangsa. Peneliti menyimpulkan bahwa fraksi PKB telah berupaya untuk menjalin komunikasi politik bersama dengan organisasi NU melalui Garda Bangsa. Namun belum mencapai tingkat yang maksimal, karena mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak fraksi kepada warga NU tentang adanya organisasi tersebut. Kurangnya komunikasi tersebut yang menyebabkan Organisasi Garda Bangsa belum berjalan secara maksimal.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

### C. Analisis Data Penelitian

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara merupakan salah satu partai politik yang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan partai lain. Menurut ketua fraksi PKB yaitu Bapak Kholis Fu'ad, S.HI fraksi PKB merupakan fraksi yang kepanjangan dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa yang notabennya sebagai alat politik Nahdlatul Ulama, jadi kiprah seluruh anggota dewan di fraksi PKB yaitu melaksanakan amanah dari Nahdlatul Ulama yang didalamnya terdapat warga NU yang terbagi dalam beberapa komunitas, misalnya petani, pendidik, pondok pesantren dll<sup>24</sup> Sedangkan menurut Bapak Miftahurroqib mengatakan bahwa<sup>25</sup> : “fraksi PKB ini adalah fraksi yang visinya bersinergi dengan Nahdlatul Ulama, jadi dapat dikatakan bahwa PKB itu memperjuangkan visi NU, ini merupakan keistimewaan dari fraksi PKB dibandingkan dengan fraksi lain. Kalau misalnya partai yang religius misalnya PPP itu kan visinya masih umum. Kalau PKB itu kan alat politik NU atau dilahirkan dari NU sehingga visinya itu mengawal program-program dan mengawal kebijakan NU, yang istimewa disitu. Secara kepentingan itu arahnya kesana namun dalam masyarakat kita tetap mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat”. Lain halnya dengan Bapak Nur Hamid yang mengatakan bahwa<sup>26</sup> : “ fraksi PKB ini adalah fraksi yang baik, mengayomi masyarakat dalam artian pembuatan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat”. Sedangkan menurut tenaga ahli fraksi PKB yaitu Bapak Mulyadi menganggap bahwa fraksi PKB adalah fraksi yang kental dengan nuansa pesantren, kental dengan suasana isu-isu kemasyarakatan, dan rata-rata DPRnya itu berasal dari tokoh masyarakat, tidak asal-asalan nyalon namun memang dilatarbelakangi entah itu dari tokoh masyarakat, ketua organisasi NU atau kyai, dari anshor, dari ma'arif dan organisasi NU lainnya. Itu adalah ciri khas dari fraksi PKB dibandingkan dengan fraksi-fraksi yang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kholis Fu'ad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari, 2022.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Miftahurroqib, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari, 2022.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Nur Hamid, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari, 2022.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Mulyadi, Tenaga Ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari, 2022.

Dari beberapa ciri fraksi PKB yang disampaikan oleh ketua fraksi, sekretaris dan tenaga ahli Fraksi PKB ternyata PKB merupakan salah satu partai politik yang tergolong pada partai politik Islam. Hal ini dibuktikan pada informasi yang disampaikan oleh Bapak Kholis Fu'ad dan Bapak Miftahurroqib. Berdirinya partai politik Islam PKB dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya pertama, banyaknya jumlah umat muslim, yang seharusnya memiliki wadah atau tempat untuk menyalurkan aspirasi melalui partai Islam. Kedua, munculnya kesadaran umat muslim untuk berdakwah melalui media politik, namun disisi lain tidak mengesampingkan jalur kultural. Apabila umat muslim memegang kekuasaan maka proses dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui undang-undang negara akan dipermudah. Ketiga, perubahan pola pikir umat islam terkait dengan politik, yang awal mulanya menganggap bahwa politik adalah urusan duniawi menjadi ukhrawi. Keempat, partai politik Islam tentunya bersifat terbuka dan *Rahmatan lil'alamin*. Kelima, ideologi yang digunakan tentunya berbasis Islam. Keenam, pemimpin dalam partai politik Islam harus memenuhi 4 kategori yaitu sidiq, amanah, fathonah dan tablig. Namun disisi lain harus memenuhi kriteria internal pada partai politik Islam itu sendiri.<sup>28</sup>

PKB Kabupaten Jepara merupakan partai politik islam yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan 3 anggota DPRD, dari beberapa individu tersebut tergabung dalam sebuah kelompok partai dan memiliki tujuan yang sama. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Nur Hamid bahwa fraksi PKB ini adalah fraksi yang baik, mengayomi masyarakat dalam artian pembuatan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.<sup>29</sup> Hal ini sepadan dengan apa yang telah dikatakan oleh Miriam Budiarjo bahwa partai politik merupakan sekelompok orang yang terstruktur dan memiliki tujuan.

Selain itu adanya partai politik Islam fraksi PKB dijadikan sebagai pemecah masalah yang terjadi dalam masyarakat. dan yang terakhir fraksi PKB berperan sebagai pembuatan kebijakan, karena setelah anggota memperoleh kekuasaan maka secara

---

<sup>28</sup> Rita Eka Izzaty, Budi Astuti, and Nur Cholimah, "Peran Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013, 24–26.

<sup>29</sup> Nur Hamid, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, wawancara oleh penulis, 31 Januari 2022.

otomatis mereka diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Adanya partai politik khususnya PKB dijadikan sebagai perwujudan dari adanya pelaksanaan hak asasi manusia yaitu dengan berkumpul, berserikat dan juga menyampaikan pendapat dengan tujuan untuk mendukung proses terlaksananya demokrasi pada suatu Negara.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa salah satu fungsi adanya fraksi PKB dijadikan sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan proses yang saling berkaitan dengan menghubungkan penyampaian informasi antara individu dan juga kelompok di lingkungan masyarakat. Selain itu komunikasi politik juga dapat dikatakan sebagai proses peralihan antar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada satu sistem politik lainnya. Strategi komunikasi politik yang telah dilakukan oleh fraksi PKB memiliki beberapa tujuan, yaitu antara lain yaitu untuk mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota DPRD Fraksi PKB. Hal ini sepadan dengan apa yang telah dikatakan oleh John Fiske yaitu komunikasi dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu untuk merubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat, selain itu fokus terhadap pesan yang disampaikan agar memperoleh sesuatu. Jadi dalam melaksanakan komunikasi Fraksi PKB secara tidak langsung telah menerapkan pemikiran John Fiske.<sup>30</sup>

Selain itu tujuan diadakanya komunikasi politik tidak lain adalah 1). Mengembangkan Citra Politik, khususnya fraksi PKB Kabupaten Jepara, yang berhubungan dengan pendapat umum pada dunia politik. Tujuan lain dengan adanya komunikasi politik yaitu 2). Membentuk Opini Publik dan juga mendorong adanya partisipasi politik. Yaitu adanya kebebasan berpendapat, menyatakan kehendak, dan gagasan. Opini publik dapat dikatakan sebagai pendapat umum yang muncul melalui adanya harapan-harapan dari individu maupun kelompok, diskusi atau hasil interaksi. Sedangkan untuk meningkatkan komunikasi politik melalui partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dengan melalui proses penyampaian aspirasi. hal ini sepadan dengan apa yang telah dikatakan oleh Samuel P.Huntington untuk menggalang partisipasi politik baik individu maupun kelompok

---

<sup>30</sup> Fiske, "Buku Pengantar Ilmu Hukum", (2012, Depok,n.d.).

dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hal ini bisa dilakukan melalui proses penggabungan kepentingan yang aspirasikan kepada pemegang kekuasaan untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Selain itu melalui proses aspirasi individu pada sebuah kelompok yang berupa ide atau gagasan untuk dijadikan sebagai program kerja.

Adanya komunikasi politik yang dilakukan oleh fraksi PKB Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk melakukan 3). Sosialisasi Politik kepada masyarakat. Fraksi PKB melakukan komunikasi politik melalui sosialisasi dengan masyarakat khususnya pada organisasi NU. Sosialisasi ini dilakukan agar dapat menarik simpati, dapat merubah pola pikir masyarakat yang salah dan secara langsung ingin mendekatkan diri kepada masyarakat. hal ini sepadan dengan apa yang dikatakan oleh David Easton dan Jack Dennis bahwa sosialisasi politik merupakan proses perkembangan individu maupun kelompok untuk memperoleh simpati dari pihak sasaran tersebut. Sosialisasi politik berhasil dilakukan ketika muncul pola pikir dan perilaku yang hubungan dengan pesan yang disampaikan. Selain itu tujuan danya komunikasi politik yaitu 4). Pendidikan Politik, untuk memberikan pendidikan politik dengan menanamkan dan mempertahankan sistem nilai politik pada setiap perilaku dan berfikir baik individu maupun kelompok. Selain itu tujuan komunikasi politik adalah sebagai 5). Sarana Rekrutmen Politik, Rekrutmen politik ini dilakukan melalui komunikasi politik dengan berusaha untuk mengajak masuk ke dalam tujuan dan nilai politik, yang secara kongkrit akan dimasukkan pada anggota politik baik sebagai kader, simpatisan maupun anggota organisasi politik.<sup>31</sup>

Ketika melaksanakan komunikasi politik Fraksi PKB berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan, selain itu fraksi PKB juga memberikan opini bahwa dengan diadakannya komunikasi politik ini akan menjamin masa depan masyarakat. Hal ini tergolong pada hakikat komunikasi politik, yaitu sekelompok anggota yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan melalui

---

<sup>31</sup> Risky Abdul Malik, "Komunikasi Politik ( Studi Kegiatan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019."

komunikasi politik.<sup>32</sup> Strategi komunikasi politik yang digunakan oleh fraksi PKB Kabupaten Jepara melalui 2 metode yaitu kegiatan reses dan Organisasi Garda Bangsa. Melalui 2 metode tersebut komunikasi politik antara anggota DPRD dengan masyarakat akan terjadi. Berikut ini penjelasan terkait dengan 2 metode komunikasi politik yaitu reses dan garda bangsa.<sup>33</sup>

**a. Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara Tahun 2021**

Reses merupakan salah satu strategi komunikasi politik yang digunakan oleh fraksi PKB Kabupaten Jepara untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Reses adalah sebuah kegiatan yang sifatnya rutin dan menjadi tanggung jawab oleh setiap masing-masing anggota DPRD. Selain itu reses juga dapat dikatakan sebagai masa istirahat, dengan mengunjungi daerah pilihan masing-masing pada kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu setiap periode selama 5 tahun dilaksanakan reses sebanyak 14 kali, dalam satu tahun dilakukan reses sebanyak 3 kali. Dalam satu kali reses dilaksanakan selama 3 hari, setiap harinya dibatasi dengan 80 peserta reses. Kegiatan reses ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalin komunikasi politik dalam bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. diakhir kegiatan reses tentunya dibentuk sebuah pelaporan yang dibuat oleh setiap anggota DPRD dan direkapitulasi oleh Tenaga Ahli fraksi PKB, setelah itu laporan tersebut disampaikan oleh ketua fraksi kepada pimpinan DPRD pada sidang paripurna.<sup>34</sup>

Adanya kegiatan reses yang dilaksanakan oleh PKB ini menjadikan bukti bahwa dengan adanya partai politik maka dapat dijadikan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia yaitu dengan berkumpul, berserikat dan juga menyampaikan pendapat dengan tujuan untuk mendukung proses terlaksananya demokrasi pada suatu Negara. Tujuan diadakannya reses sesuai dengan apa yang telah dijelaskan terkait dengan tujuan komunikasi politik ternyata reses

---

<sup>32</sup> Acis, "Bab 1 Konsep Komunikasi Islam", no. Simbiosis Rekama Media (2020): 26.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Kholis Fuad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>34</sup> Laporan Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara Tahun 2021

memiliki tujuan yang sama diantaranya yaitu: 1). Citra Politik, melalui kegiatan reses maka fraksi PKB bisa memperkenalkan identitas yang dimiliki oleh PKB untuk menciptakan citra partai. 2). Opini Publik, dibuktikan pada saat kegiatan reses berlangsung maka komunikator akan menyampaikan pesan terhadap komunikan, dari pesan tersebut maka komunikan akan memberikan feedback atau respon kepada komunikator. 3). Partisipasi Politik, dibuktikan pada saat kegiatan reses tentunya setiap anggota DPRD melakukan strategi tertentu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu dibuktikan pada saat masyarakat ikut berpartisipasi untuk ikut menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD. 4). Sosialisasi politik, sebelum atau sesudah pelaksanaan kegiatan reses tentunya dilaksanakan sosialisasi. Ketika proses kegiatan reses dilaksanakan, tentunya anggota DPRD memberikan beberapa materi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, materi tersebut tentu berkaitan dengan permasalahan yang ada pada lingkungan masyarakat. 5). Pendidikan politik, ketika reses berlangsung tentu masyarakat menyampaikan permasalahan yang ada dan anggota DPRD memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat terkait dengan permasalahan tersebut.<sup>35</sup> Jadi anggota DPRD berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta reses. Dari beberapa tujuan tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Nur Hamid yang mengatakan bahwa<sup>36</sup> : “fraksi PKB ini adalah fraksi yang baik, mengayomi masyarakat dalam artian pembuatan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat”.

Terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan reses, Bapak Kholis mengatakan bahwa : “Jadi reses itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk melakukan penjangkaran aspirasi. Dalam satu tahun itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan secara keseluruhan pembiayaan itu diatur oleh anggaran APBD. Anggota dewan dalam melaksanakan reses sebanyak 3 kali dalam satu tahun itu berarti per 4 bulan. Reses itu dilaksanakan dimasing-masing dapil untuk bertemu dengan

---

<sup>35</sup> Kamaruddin, “Modul Komunikasi Politik”, *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, no 9 (2015):6.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Nur Hamid, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari, 2022.

konstituen misalnya dengan komunitas pemangku kebijakan ditingkat desa kepala desa, BPD, ormas maupun bertemu dengan kader-kader partai. Reses ini menghimpun beberapa aspirasi yang disampaikan oleh warga maupun komunitas masyarakat yang disampaikan pada saat reses. Kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk laporan kepada DPRD dan secara administrasi laporan ini disampaikan dan diparipurnakan. Selain itu diajukan kepada Bappeda agar aspirasi ini dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah itu diseleksi masuk di RKPD untuk disinkronkan hasil pokok-pokok pikiran, jadi hasil dari pokok-pokok pikiran reses ini disinergikan dengan program-program OPD. OPD ini memiliki program yang dihimpun dari musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten”.<sup>37</sup> Lain halnya dengan Bapak Nur Hamid yang mengatakan bahwa : “ Sebelum reses dilaksanakan kebutuhan utama yang harus saya penuhi adalah masalah dana. Setelah dana terkumpul tentunya suatu acara akan berjalan dengan baik, yang dibantu oleh tim saya”.<sup>38</sup> Sedangkan Bapak Miftahurroqib mengatakan bahwa: “untuk melaksanakan reses, dari tim saya melakukan rapat untuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan reses, mulai dari penentuan waktu, tempat, undangan dll”.<sup>39</sup>

Untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan reses, dari ketiga anggota DPRD tentunya memiliki perbedaan, seperti waktu dan tempat pelaksanaan reses. Terkait dengan waktu dari ketiga anggota DPRD tersebut reses dilaksanakan pada tanggal 17,18 dan 19 Januari 2021. Namun sift dilakukan pada jam yang berbeda. Bapak Kholis Fu’ad melaksanakan reses pada pukul 12.00 WIB-21.00 WIB. Sedangkan Bapak Nur Hamid melaksanakan reses pada pukul 08.00 WIB-22.00 WIB, sama halnya yang dilaksanakan oleh Bapak Miftahurroqib. Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan reses ini dilaksanakan sesuai dengan daerah pilihannya yaitu Bapak

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Kholis Fu’ad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Nur Hamid, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari 2022.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Miftahurroqib, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari 2022.

Nur Hamid di dapil 2, Bapak Kholis di dapil 3, dan Bapak Miftahurroqib di dapil 4.<sup>40</sup>

Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Kholis Fu'ad, Bapak Nur Hamid dan Bapak Miftahurroqib, dalam melaksanakan strategi komunikasi politik khususnya kegiatan reses tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Strategi komunikasi politik yang mereka gunakan tentu menyesuaikan kebutuhan masyarakat atau isu-isu yang ada dilingkungan masyarakat. Dalam menjalankan strategi komunikasi politik dari ketiga anggota tersebut hampir sama yaitu melalui sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat khususnya pada organisasi Nahdlatul Ulama yaitu IPNU-IPPNU, Anshor, fatayat, muslimat dll. Perbedaannya dengan melihat kondisi lingkungan atau masalah-masalah yang terjadi untuk dijadikan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan reses.

Setelah melakukan wawancara bersama dengan ketua fraksi, PKB, sekretaris, dan anggotanya, ternyata ada banyak tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses. Dari tahapan-tahapan tersebut tentunya dipersiapkan secara matang, karena mereka berharap agar kegiatan reses berjalan dengan baik serta dapat menarik simpati peserta reses untuk mengikuti kegiatan ini secara maksimal. Selain itu masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan kegiatan reses ini dengan sebaik-baiknya.

Dari ketiga anggota DPRD yang telah diwawancarai oleh peneliti, rata-rata mereka mempersiapkan kegiatan reses secara individu, tanpa ada persiapan internal dari fraksi. Bapak Kholis mengatakan bahwa : “Persiapan internal dari fraksi untuk kegiatan reses ini hampir tidak ada, karena secara keseluruhan itu difasilitasi oleh DPRD”.<sup>41</sup> Lain halnya dengan Bapak Mulyadi yang mengatakan bahwa: “Kalau persiapan secara internal dari fraksi memang tidak terlalu diutamakan, terkadang persiapan itu dilakukan dengan berdiskusi melalui

---

<sup>40</sup> Laporan Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara Tahun 2021.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Kholis Fu'ad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

media whatsapp grup”.<sup>42</sup> Hal inilah yang menyebabkan kurangnya komunikasi yang efektif antar anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan reses muncul hambatan-hambatan yang tentunya mengganggu proses berjalannya kegiatan tersebut.

Bapak Kholis mengatakan bahwa: “ Hambatan-hambatan yang muncul yaitu karena keterbatasan waktu pelaksanaan reses, keterbatasan dana yang menyebabkan tingkat partisipasi peserta reses (umat muslim) menurun”.<sup>43</sup> Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut beliau berupaya untuk meminimalisir yaitu rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendapatkan simpati umat muslim. Sedangkan Bapak Nur Hamid mengatakan bahwa :” hambatan yang muncul itu masing tingkat kewajaran, seperti tidak tepat waktu, tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan reses belum maksimal”.<sup>44</sup> Adanya hambatan tersebut beliau berusaha memberikan pemahaman yang cukup melalui media sosialisasi dilingkungan masyarakat. lain halnya dengan Bapak Miftahurroqib mengatakan bahwa : “ Hambatan yang terjadi di dapil IV adalah hambatan yang wajar seperti jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan jumlah undangan, selain itu peserta yang datang belum tentu dapat menganalisa masalah dilingkungan dengan waktu yang cukup singkat.” Untuk meminimalisir hambatan tersebut beliau berusaha meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendekatan di lingkungan masyarakat terkait dengan pentingnya kegiatan reses. Dari ketiga anggota DPRD tersebut mereka berharap bahwa untuk kegiatan reses selanjutnya peserta reses mampu meningkatkan kesadaran diri sendiri akan pentingnya kegiatan reses.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ketiga anggota DPRD dan melihat hambatan-hambatan yang cukup banyak tentu sangat mengganggu proses pelaksanaan kegiatan reses. Hambatan yang muncul tentunya saling merugikan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Mulyadi, Tenaga Ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari 2022.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kholis Fu'ad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Nur hamid, Aggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari 2022.

antara pihak anggota DPRD dan peserta reses. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan reses tidak berjalan dengan maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan reses tentunya dari 2 pihak yaitu anggota DPRD dan peserta reses mampu bekerjasama dengan baik. Karena dari kedua pihak sama-sama membutuhkan satu sama lain. Dengan mempersiapkan pelaksanaan reses secara maksimal dan peserta reses mampu memberikan pemahaman bagi diri sendiri terkait dengan kegiatan ini, kemungkinan kegiatan reses akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota DPRD dan peserta reses.

Untuk memaksimalkan kegiatan reses seharusnya dapat memenuhi beberapa unsur politik, dalam kegiatan reses ini ada beberapa unsur sebagai pendorong pelaksanaan komunikasi politik yaitu:<sup>45</sup> 1). Komunikator politik adalah seorang individu yang memiliki kekuasaan, individu yang menduduki suatu institusi, asosiasi, dan partai politik. Komunikator politik adalah bagian terpenting dalam proses berlangsungnya komunikasi. Komunikator politik ini memiliki kekuasaan dalam mengelola dan juga mengendalikan pesan komunikasi. Sebagai seorang komunikator tentunya harus memiliki daya tarik yang tinggi mulai dari fisik, gaya bicara, kedekatannya dengan komunikan dan tingkahlakunya. Komunikator utama dalam melaksanakan kegiatan reses diduduki oleh anggota DPRD. Karena sebelum masyarakat menyampaikan aspirasi, anggota DPRD memberikan materi-materi sesuai dengan permasalahan yang ada pada masyarakat. 2). Komunikan ini dapat berupa individu maupun kelompok yang berada dalam institusi, organisasi, masyarakat maupun dalam sebuah partai politik. Meskipun khalayak umum posisinya sebagai komunikan. Namun hal itu sifatnya masih sementara. Karena untuk giliran selanjutnya komunikan akan memprakarsai penyampaian pesan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikan akan merubah posisinya sebagai komunikator. Pada kegiatan reses yang menduduki posisi sebagai komunikan adalah peserta reses, namun hal ini sifatnya sementara, karena setelah anggota DPRD

---

<sup>45</sup> Kamaruddin, "Modul Komunikasi Politik", *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, no 9 (2015):6.

menyampaikan materi maka peserta reses akan memberikan respon dengan menyampaikan aspirasi ataupun memberikan pertanyaan, jadi peserta reses juga bisa diposisikan sebagai komunikator. 3). Pesan merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam melaksanakan komunikasi politik. Pesan yang disampaikan kepada komunikator berupa pesan verbal maupun non verbal. Pesan politik bisa disampaikan oleh politisi, pejabat atau warga Negara yang aktif. Pesan politik yang disampaikan tentunya dapat mempengaruhi peserta komunikasi agar menghasilkan sesuatu. Pesan-pesan dapat disampaikan oleh anggota DPRD maupun peserta reses. Pesan-pesan yang disampaikan lebih khususnya pada permasalahan yang ada seperti mahalnya pupuk bersubsidi, infrastruktur pembangunan sekolah yang lama, kurangnya renovasi masjid dll. 3). Media komunikasi dijadikan sebagai saluran atau perantara untuk mempermudah penyampaian pesan. Untuk melaksanakan komunikasi politik dengan masyarakat anggota DPRD fraksi PKB Kabupaten Jepara menggunakan media reses. Sedangkan dalam proses kegiatan reses untuk menyampaikan pesan melalui berbicara secara langsung dan melalui form yang telah disediakan. Untuk menyampaikan pesan peserta reses tentunya berasal dari perwakilan-perwakilan organisasi NU atau komunitas masyarakat, jadi mereka sebagai wakil yang akan menyampaikan pesan-pesan kepada anggota DPRD. Hal ini tergolong pada media komunikasi organisasi, yaitu menggabungkan beberapa pesan menjadi satu pesan yang akan disampaikan kepada komunikator.

Seperti yang dipaparkan diatas apabila ada satu unsur tidak terpenuhi maka komunikasi politik tidak dapat dilaksanakan. Salah satu unsur komunikasi politik yaitu komunikasi yang diduduki oleh peserta reses. Peserta reses yang dilaksanakan oleh PKB Kabupaten Jepara berasal dari seluruh lapisan masyarakat yaitu pemerintahan yaitu camat, TNI/ Polri/ PNS, lurah/ kades/ Perangkat Desa, ketua RW/RT. Dari kelompok masyarakat yaitu organisasi politik, tokoh masyarakat/tokoh agama, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Majelis Ta'lim, masyarakat umum. Jumlah keseluruhan peserta reses sebanyak 80 orang per hari dan dibagi menjadi 3 shift selama tiga hari. Karena

masih dalam kondisi pandemi, selain itu peserta reses dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.<sup>46</sup>

Untuk menarik simpati mereka fraksi PKB memiliki beberapa strategi khususnya umat muslim untuk mengikuti kegiatan reses. Strategi-strategi tersebut tentunya berbeda antara anggota DPRD satu dengan yang lainnya. Bapak Kholis mengatakan bahwa: “ Kalau saya lewat media pendekatan kepada organisasi-organisasi Nahdlatul Ulama, selain itu saya juga memanfaatkan organisasi garda bangsa untuk mendekati diri kepada mereka, agar mereka memberikan dukungan atau menjadi kader saya. Selain itu saya juga memberikan uang transport sebanyak Rp 50.000,00 per orang, snack dan makan siang”.<sup>47</sup> Sedangkan Bapak Miftahurroqib melalui media sosialisasi atau pendekatan dengan masyarakat umum khususnya pada warga Nadliyin. Beliau juga berusaha membuktikan bahwa mampu membawa perubahan lebih baik tanpa memandang golongan apapun. Selain itu beliau memberikan uang transport sebesar Rp 50.000,00 kepada peserta reses dan snack”.<sup>48</sup> Lain halnya dengan Bapak Nur Hamid beliau memberikan uang transport sebanyak Rp 50.000,00, snack , makan siang dan kalender.<sup>49</sup>

Setelah melihat beberapa strategi yang digunakan oleh anggota DPRD dalam memperoleh simpati umat muslim melalui kegiatan reses, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses perolehan simpati umat muslim perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peserta reses anggota DPRD rela mengeluarkan waktu, tenaga dan uang. Dengan strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan umat muslim dalam melaksanakan kegiatan reses. Namun disisi lain masih banyak masyarakat yang hanya memandang bahwa ketika reses hal utama yang diminati adalah karena uang. Dengan adanya uang dll tentu harus

---

<sup>46</sup> Laporan Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara Tahun 2021.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Kholis Fu'ad, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Miftahurroqib, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari 2022.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Nur Hamid, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 31 Januari 2022.

diimbangi dengan penyampaian aspirasi yang maksimal, bukan hanya sekedar duduk dan mendengarkan. Pemahaman-pemahaman terkait dengan permasalahan tersebut tentu harus diperbaiki.

Dari beberapa sasaran reses yang telah dipaparkan diatas, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa peserta reses yaitu Ibu Fadlilah sebagai anggota fatayat desa Tulakan Donorojo, beliau mengatakan bahwa: “kegiatan reses yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kholis belum tepat, karena masalah yang muncul tidak lain yaitu adanya waktu yang terlalu singkat untuk mendiskusikan permasalahan yang muncul dilingkungan masyarakat. Selain itu pelaksanaannya belum maksimal karena mungkin terlalu banyak materi yang disampaikan oleh Bapak Kholis, sehingga waktu untuk menyampaikan aspirasi ini terlalu sedikit”.<sup>50</sup> Sedangkan Bapak Mas’ad yang notabnya sebagai Kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Pancur III yang menganggap bahwa reses yang dilaksanakan oleh Bapak Miftahurroqib sudah cukup baik, karena sebagai wakil rakyat bapak roqib tidak berani mengambil keputusan sendiri. Beliau mengutamakan musyawarah dan berdiskusi dalam memutuskan perkara. Selain itu sebelum Bapak Roqib mencalonkan diri sebagai seorang wakil rakyat, beliau pernah menjadi kepala desa selama 2 periode, jadi setidaknya beliau memiliki bekal yang cukup untuk terjun didunia politik.<sup>51</sup> Lain halnya dengan Bapak Sairi yang menganggap bahwa reses yang dilaksanakan oleh bapak Nur Hamid sudah tepat. Meskipun dalam pelaksanaan reses beliau datang terlambat, dalam proses penyampaian aspirasi beliau membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu ketika penyampaian materi oleh Bapak Nur Hamid ini dilakukan secara santai dengan guyonan namun mudah dipahami. Hal ini menjadi daya tarik sendiri sebagai komunikator dalam menyampaikan komunikasi. Untuk menyampaikan aspirasi bisa melalui form yang disediakan oleh panitia. Form tersebut dijadikan sebagai salah satu unsur terjalannya komunikasi

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Fadlilah, Peserta Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Mas’ad, Peserta Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 26 Januari 2022.

politik yaitu adanya media komunikasi. Terkait dengan form tersebut bapak sairi mengatakan bahwa : “ Tapi yang saya lihat ya mba, masih banyak yang tidak dapat memanfaatkan form tersebut, banyak sekali form yang dibuang dan tidak diisi. Padahal kita sudah diberi peluang tapi masih banyak yang menganggap reses itu sepele”.<sup>52</sup>

Dari ketiga peserta reses tersebut ternyata memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat-pendapat tersebut perlu dievaluasi oleh anggota DPRD untuk mempersiapkan segala hal secara matang dalam melaksanakan kegiatan reses. Selain itu evaluasi juga perlu diterapkan oleh peserta reses yang belum memiliki kesadaran atas pentingnya kegiatan reses. Artinya setiap peserta reses dituntut agar bisa merubah pola pikir mereka yang salah. Untuk mengubah pola pikir masyarakat tentu butuh proses melalui sosialisasi dan pendekatan khusus.

Jika dilihat dari beberapa sasaran peserta reses tersebut maka dapat dianalisis menggunakan teori varian keberagaman umat muslim yang telah dipaparkan pada bab 2, pada teori ini muncul 2 Ilmuan Barat yang ingin mengkaji varian keberagaman umat muslim, yaitu Clifford Gertz dan Mark Woodward. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Clifford Gertz mengkategorikan aliran masyarakat jawa menjadi 3 yaitu, abangan, santri dan priyayi. Kategori abangan difokuskan pada pentingnya animistik,<sup>53</sup> santri difokuskan pada aspek keislaman.<sup>54</sup> Sedangkan priyayi mengunggulkan aspek hindu.<sup>55</sup> Lain halnya dengan Mark Woodward yang membagi 4 konsep yaitu konsep tentang keesaan tuhan, konsep lahir batin, hubungan manusia dengan tuhan, relasi markoskosmos dengan mikrokosmos.<sup>56</sup> Selain itu Mark Woodward membagi beberapa kelompok berdasarkan doktrin

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Sairi, Peserta Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 4 Februari 2022.

<sup>53</sup> Subair, “Abangan, Santri, Priyayi: Islam Dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa.”, *Dialektika* 9, no2 (2015): 34-46.

<sup>54</sup> Mahli Zainudin tago, “Agama Dan Integrasi Sosial Dalam Pemikiran Clifford Geertz.” 7 (2013), 79-94.

<sup>55</sup> Riady, “Agama Dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz.” 2.2 (2021), 13-22.

<sup>56</sup> Amrozi, “Keberagaman Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward.”

dan akar sosial masyarakat Islam, indigenized Islam (ekspresi Islam yang sifatnya lokal), kelompok tradisional Nahdlatul Ulama, Islam Modernis, Islamisme (Islamis) dan neo modernis Islam. Jika dilihat dari sasaran peserta reses anggota DPRD lebih condong pada penelitian yang dilakukan oleh Mark Woodward. Yaitu pada bagian kelompok tradisional Nahdlatul Ulama. Bapak Nur Hamid mengatakan bahwa: “ untuk peserta reses 90% dari seluruh pendukung saya khususnya pada organisasi NU, 10% dari masyarakat umum”.<sup>57</sup> Dari hasil wawancara inilah peneliti menyimpulkan bahwa anggota DPRD memilih sasaran reses sesuai dengan teori Mark Woodward pada bagian kelompok tradisional NU.<sup>58</sup>

#### **b. Organisasi Garda Bangsa Kabupaten Jepara**

Selain adanya kegiatan reses, strategi komunikasi yang dilakukan oleh fraksi PKB tidak lain adalah melalui kegiatan Organisasi Garda Bangsa. Garda bangsa merupakan suatu organisasi yang menjadi sayap bagi PKB. Garda Bangsa dijadikan sebagai pendukung sistem bagi PKB. Untuk menjalankan kinerjanya organisasi ini melakukan pertemuan secara rutin, dalam pertemuan tersebut terkadang melibatkan fraksi PKB sesekali melibatkan pihak fraksi PKB. Untuk menjalankan komunikasi politik tentunya harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:<sup>59</sup> 1). Komunikator, komunikator politik adalah bagian terpenting dalam proses berlangsungnya komunikasi. Komunikator politik ini memiliki kekuasaan dalam mengelola dan juga mengendalikan pesan komunikasi. Komunikator utama dalam organisasi garda bangsa adalah anggotanya sendiri. Dengan berdiskusi atau musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dilingkungan masyarakat. Sebagai seorang komunikator tentunya harus memiliki daya tarik yang tinggi mulai dari fisik, garaya bicara, kedekatannya

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Nur Hamid, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Januari 2022.

<sup>58</sup> Ozi Setiadi, *ISLAM DAN CIVIL SOCIETY: Pergerakan Hizmet di Indonesia sebagai Tipologi Civil Society Budaya*, Imprensa Publishing, 2013. 48-49.

<sup>59</sup> Kamaruddin, “Modul Komunikasi Politik.”, *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No 9 (2015):6.

dengan komunikasi dan tingkahlakunya. Hal ini menjadikan anggota organisasi garda bangsa untuk dapat memberikan ide atau mempengaruhi pola pikir fraksi PKB dalam membuat kebijakan. 2). komunikasi, Komunikasi ini dapat berupa individu maupun kelompok yang berada dalam institusi, organisasi, masyarakat maupun dalam sebuah partai politik. Meskipun khalayak umum posisinya sebagai komunikasi. Namun hal itu sifatnya masih sementara. Karena untuk giliran selanjutnya komunikasi akan memprakarsai penyampaian pesan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi akan merubah posisinya sebagai komunikator. Hal ini dibuktikan ketika anggota organisasi garda bangsa menyampaikan pesan, maka komunikasi yang diduduki oleh fraksi PKB akan memberikan feedback atau respon terkait dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hal inilah yang menyebabkan komunikasi sifatnya sementara. Jadi komunikator dapat berubah menjadi komunikasi untuk memberikan feedback. 3). Pesan, pesan merupakan unsur terpenting yang harus dipenuhi dalam melaksanakan komunikasi politik. Pesan yang disampaikan pada organisasi garda bangsa berupa penyampaian permasalahan, pemberian ide dan penyampaian aspirasi mereka. 4). Media komunikasi, organisasi garda bangsa dalam proses penyampaian pesan dilakukan secara lisan dan bertatap muka agar komunikasi yang terjalin lebih efektif.

Dalam melaksanakan komunikasi politik organisasi garda bangsa memiliki beberapa tujuan yaitu :<sup>60</sup>

1) Sarana pengembangan citra politik.

Adanya organisasi garda bangsa dapat dijadikan sebagai pengembangan citra politik. ketika proses komunikasi politik telah dilaksanakan maka akan muncul feedback yaitu dapat berupa pendapat maupun perilaku tertentu. Citra ini berupa gambaran umum pada politik melalui kepercayaan, penilaian maupun pengharapan. Citra politik akan muncul melalui pola pikir yang secara otomatis akan memberikan penilaian. Ketika komunikator menyampaikan pesan maka secara otomatis komunikasi

---

<sup>60</sup> Rush, Michel dan Philip Althoff, 'Pengantar Sosiologi Politik', (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 24.

akan memberikan feedback atau respon terhadap pesan tersebut.

## 2). Opini Publik

Komunikasi politik yang terjalin antara anggota DPRD fraksi PKB dengan anggota organisasi garda bangsa tentunya akan memunculkan opini publik, atau bisa dikatakan sebagai pendapat umum yaitu adanya kebebasan berpendapat, menyatakan kehendak, dan gagasan. Opini publik dapat dikatakan sebagai pendapat umum yang muncul melalui adanya harapan-harapan dari individu maupun kelompok, diskusi atau hasil interaksi. Dalam melaksanakan kegiatannya tentu diantara anggota DPRD fraksi PKB dengan anggota organisasi garda bangsa tentunya akan muncul beberapa pendapat terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

## 3). Partisipasi Politik

Adanya organisasi tersebut tentunya dijadikan sebagai media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya partisipasi masyarakat kemungkinana akan muncul beberapa ide atau aspirasi yang disampaikan kepada pimpinan. Hal ini sepadan dengan apa yang telah disampaikan oleh P.Huntington yaitu untuk menggalang partisipasi politik baik individu maupun kelompok dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hal ini bisa dilakukan melalui proses penggabungan kepentingan yang aspirasikan kepada pemegang kekuasaan untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Selain itu melalui proses aspirasi individu pada sebuah kelompok yang berupa ide atau gagasan untuk dijadikan sebagai program kerja.

## 4). Sarana Sosialisasi Politik

Organisasi garda bangsa dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi politik dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari sasaran tersebut. hal ini dibuktikan pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh fraksi PKB yaitu dengan melakukan pendekatan dengan organisasi-organisasi untuk mendapatkan kader-kader pendukung mereka.

#### 5). Sarana Pendidikan Politik

Organisasi garda bangsa dapat dijadikan sebagai media untuk mendapatkan pendidikan politik. Pendidikan politik ini dapat diperoleh ketika berdiskusi atau berinteraksi antar anggota ataupun dengan anggota DPRD fraksi PKB dalam membahas dunia perpolitikan.

#### 6). Sarana Rekrutmen Politik

Organisasi garda bangsa dapat dijadikan sebagai ajang rekrutmen atau perantara untuk terjun didunia politik, dan menjadi regenerasi untuk melanjutkan kepemimpinan selanjutnya.

Anggota dari organisasi Garda Bangsa adalah dikhususkan kepada para pemuda jepara salah satunya adalah mahasiswa. Mengingat bahwa pemilihan ditahun selanjutnya sasarannya adalah pemilih pemula. Namun anggota organisasi garda bangsa tetap melibatkan organisasi Nahdlatul Ulama seperti IPNU-IPPNU, GP Anshor, fatayat mulimat dan organisasi NU lainnya. Karena mengingat bahwa PKB dilahirkan dari badan otonom NU. Sedangkan organisasi garda bangsa merupakan organisasi yang berdiri dibawah naungan PKB. Jika dilihat dari beberapa sasaran anggota organisasi garda bangsa tersebut maka dapat dianalisis menggunakan teori varian keberagaman umat muslim yang telah dipaparkan pada bab 2, pada teori ini muncul 2 Ilmuan Barat yang ingin mengkaji varian keberagaman umat muslim, yaitu Clifford Gertz dan Mark Woodward. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Clifford Gertz mengkategorikan aliran masyarakat jawa menjadi 3 yaitu, abangan, santri dan priyayi.<sup>61</sup> Kategori abangan difokuskan pada pentingnya animistik, santri difokuskan pada aspek keislaman. Sedangkan priyayi mengunggulkan aspek hindu. Lain halnya dengan Mark Woodward yang membagi 4 konsep yaitu konsep tentang keesaan tuhan, konsep lahir batin, hubungan manusia dengan tuhan, relasi markoskosmos dengan mikrokosmos.<sup>62</sup> Selain itu Mark

---

<sup>61</sup> Subair, "Abangan, Santri, Priyayi: Islam Dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa." *Dialektika* 9, no. 2(2015): 34-46.

<sup>62</sup> Amrozi, "Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz Dan Mark R. Woodward."

Woodward membagi beberapa kelompok berdasarkan doktrin dan akar sosial masyarakat Islam, indigenized Islam (ekspresi Islam yang sifatnya lokal), kelompok tradisional Nahdlatul Ulama, Islam Modernis, Islamisme (Islamis) dan neo modernis Islam.<sup>63</sup> Apabila dianalisis menggunakan teori varian keberagaman Islam maka dari sasaran anggota organisasi garda bangsa lebih condong pada penelitian yang dilakukan oleh Mark Woodward, yaitu pada bagian kelompok tradisional Nahdlatul Ulama.

Pada proses pelaksanaan komunikasi politik yang telah dilakukan oleh fraksi PKB melalui organisasi garda bangsa dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dibuktikan peneliti pada saat melakukan wawancara dengan Ibu Fadhilah (anggota fatayat) mengatakan bahwa : “ Kok saya belum tau ya kalau ada organisasi garda bangsa, karena tidak semua warga nadliyin itu paham dengan sistem kerjanya organisasi garda bangsa”.<sup>64</sup> Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa fraksi PKB telah berupaya untuk menjalin komunikasi politik bersama dengan organisasi NU melalui garda bangsa. Namun belum mencapai tingkat yang maksimal, karena kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak fraksi kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi tersebut yang menyebabkan fraksi PKB dalam menjalankan komunikasi politik bersama dengan organisasi garda bangsa belum berjalan secara maksimal.

Dari kedua strategi komunikasi politik antar reses dan organisasi garda bangsa sudah memenuhi unsur-unsur dalam melaksanakan komunikasi politik yaitu adanya komunikator, komunikan, pesan dan media komunikasi.<sup>65</sup> Selain itu kedua strategi yang telah digunakan oleh fraksi PKB tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu dijadikan sebagai sarana komunikasi politik, sarana pendidikan politik, sarana

---

<sup>63</sup> Ozi Setiadi, *ISLAM DAN CIVIL SOCIETY: Pergerakan Hizmet di Indonesia sebagai Tipologi Civil Society Budaya*, Imprensa Publishing, 2013. 48-49.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Fadhilah, Peserta Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jepara, 1 Februari 2022.

<sup>65</sup> Kamaruddin, “Modul Komunikasi Politik”, *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No 9 ( 2015): 6.

rekrutmen, sebagai sarana pembentukan citra partai dan opini publik maupun partisipasi masyarakat.<sup>66</sup> Dari kedua strategi tersebut memiliki perbedaan yaitu sistem kerja dan pelaksanaan kegiatan reses maupun organisasi garda bangsa.



---

<sup>66</sup> Risky Abdul Malik, “Komunikasi Politik ( Studi Kegiatan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019.”